

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN FINANSIAL MASYARAKAT**

(Studi di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

RONI PRANDARA

NPM: 1551030082

Program Studi: Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN FINANSIAL MASYARAKAT**

(Studi di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Oleh

RONI PRANDARA

NPM. 1551030082

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Madnasir, S.E., M.S.I

Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Maka rumusan masalah yaitu bagaimana analisis akuntabilitas, kesejahteraan finansial masyarakat di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu dalam perspektif Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Menganalisa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Peningkatan Pendapatan Finansial Masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Waringinsari Barat, dengan menggunakan metode insidental sampling, Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisa berfikir deduktif yakni mengangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus. Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD 2015 - 2018 di Desa Waringinsari Barat belum dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD 2015 - 2018 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam akuntabilitas ADD pun masih dikatakan minim karena belum adanya transparansi kepada masyarakat. Sedangkan dalam Ekonomi Islam tidak ada nilai keadilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Akuntabilitas, ADD, Kesejahteraan dan Ekonomi Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RONI PRANDARA
NPM : 1551030082
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN FINANSIAL MASYARAKAT” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buata agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 06 Januari 2020

Penyusun

RONI PRANDARA
NPM. 1551030082



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmih, Sukarama, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN
FINANSIAL MASYARAKAT”**

**Nama : Roni Prandara
NPM : 1551030082
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,


**Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP. 197504242002121001**

Pembimbing II,


**Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.
NIP.**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah


**Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP. 197504242002121001**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN FINANSIAL MASYARAKAT"**, disusun oleh **Roni Prandara, NPM: 1551030082**, Program Studi: **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Rubhan Masykur, M.Pd**

Sekretaris : **Dedi Satriawan, M.Pd**

Penguji I : **Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy.**

Penguji II : **Madnasir, S.E., M.S.I**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

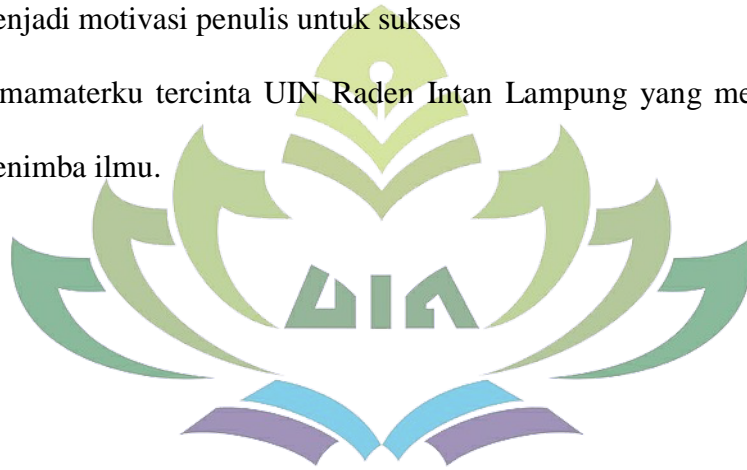
Artinya : tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-mudatstsir, 38)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah Alfenza dan Ibu Ruknan Dewi tercinta, terimakasih atas setiap do'a, motivasi, kasih sayang yang selalu membangkitkan dan menguatkan disetiap langkahku menuntut ilmu.
2. Kakakku tersayang Alkat Yanwar dan Nenekku Dauliana yang telah menjadi motivasi penulis untuk sukses
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Roni Prandara, lahir pada tanggal 12 Agustus 1997 di Pugung Penengahan Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. SD Negeri 01 Pugung Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat selesai pada tahun 2009.
2. SMP Negeri 01 Lemong, Kabupaten Pesisir Barat selesai pada tahun 2012.
3. SMA Negeri 1 Lemong, Kabupaten Pesisir Barat selesai pada tahun 2015.
4. Untuk selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Ekonomi Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sholawat serta salam disampaikan Kepada Tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikut-pengikut-Nya yang kita nantikan syafaatNya dihari akhir nanti.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mengayomi penulis.

2. Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Pembimbing Akademik 1 dan Ibu Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak selaku Pembimbing Akademik 2 yang telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai, semoga ilmu dan pengetahuan yang disampaikan mendapat barokah dari Allah SWT.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama di bangku perkuliahan.
5. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Bpk. Alfenza dan Ibu Ruknan Dewi yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa yang tak pernah putus. Terimakasih telah memberikan segala yang terbaik untuk saya.
6. Bapak Woto Siswoyo selaku kepala desa Waringinsari Barat yang telah memberikan izin serta masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Sahabat-sahabati PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Berta Lia, Novi Soleha, Fitra Ahlunnazar, Eko Setiawan, Sinta ramalia, Azmi Ananda, Merry Yusika, Rini, Titin yang selalu belajar, berjuang, dalam menuntut ilmu baik dalam segi External maupun Internal Kampus.
8. Para senior-seniorku bang Indra, bang Roy, bang Joko, mbak Juwita yang telah memberikan pengalaman berharga kepada saya.

9. Teman-teman seperjuangan kelas B dan kelas A Akuntansi Syari'ah yang selalu bersama dalam proses perkuliahan sampai proses penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan dari tanah kelahiran, semoga tetap semangat dan diberikan hidayah.
11. Cyndiana Rustin Pratiwi yang selalau memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan semua pihak yang membantu proses penulisan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan semoga kita selalu menjalankan silaturahmi.

Penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan memberikan keluasan ilmu bagi semua pihak yang telah membantu. Terimakasih banyak untuk segala bentuk do'a dan dukungan yang kalian berikan, semoga Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang membalas kebaikan kalian.

Bandar Lampung, 16 Januari 2020

Penulis

Roni Prandara
1551030082

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Pendapatan Rata-Rata Perbulan Penduduk Tahun 2015	11
2. Pendapatan Rata-Rata Perbulan Penduduk Tahun 2018	11
3. Tingkat pendidikan 2015	66
4. Jenis agama.....	67
5. Hasil program BUMDES pada tahun 2017	76
6. Hasil program BUMDES pada tahun 2018	77
7. Rincian Anggaran Belanja Pekon Waringinsari Barat Tahun 2018.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Mekanisme transfer APBN dana desa	52
2. Struktur pemerintahan desa.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran ke-

1. Blangko Bimbingan
2. Blangko Wawancara
3. Lampiran Foto



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akuntabilitas.....	21
1. Pengertian Akuntabilitas.....	21
2. Jenis-Jenis Akuntabilitas	22
3. Dimensi Akuntabilitas	23
4. Prinsip Akuntabilitas	24
B. Desa	26
1. Pengertian Desa	26

2. Pemerintahan Desa	28
C. Alokasi Dana Desa	32
1. Pengertian Alokasi Dana Desa	32
2. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa	34
3. Maksud, Tujuan, Dan Sasaran Dana Desa	37
4. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa	40
5. Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa.....	42
D. Kesejahteraan Finansial	46
1. Kesejahteraan Finansial	46
2. Indikator Kesejahteraan Finansial	47
E. Pandangan Ekonomi Islam	51
1. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) Menurut- Ekonomi Islam.....	51
2. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam.....	51
F. Tinjauan Pustaka.....	56

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
1. Sejarah singkat berdirinya Desa Waringinsari Barat.....	60
2. Kondisi Geografis Desa Waringinsari Barat	64
3. Kondisi Masyarakat Desa Waringinsari Barat	65
4. Struktur Perangkat Desa Waringinsari Barat.....	67
B. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Waringin Sari Barat Kabupaten Pringsewu	80
--	----

B. Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Finansial Masyarakat Di Desa Waringin Sari Barat Kabupaen Pringsewu	89
C. Akunrabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat Menurut Perfektif Ekonomi Islam	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul : **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN FINANSIAL MASYARAKAT (Studi di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu)”**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui

seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan¹.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah cara atau peroses dimana satu orang atau kelompok orang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan atau mewujudkan maksud dari tujuan orang tersebut.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten lalu disalurkan lagi untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk kebutuhan atau prasarana membangun masyarakat menuju masyarakat sejahtera.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan financial, spiritual dan sosial yang bertujuan agar warga negara dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Kesejahteraan diciptakan sebagai tujuan penting dari peran pemerintahan desa agar masyarakat terbantu dan teratasi dari permasalahan ekonomi, spiritual dan sosial.

5. Finansial

Finansial dalam ilmu ekonomi adalah administrasi yang mengelola urusan keluar masuknya uang pada sebuah institusi atau lembaga.

¹Ahmad Abdul Haq, *Akuntabilitas*, Tersedia Di : <https://www.wikiapbn.org/Akuntabilitas/> Diakses Pada 1 Maret 2015

Financial dapat mencakup beberapa aspek, misalnya ilmu keuangan dan aset lainnya, pengelolaan atau manajemen aset tersebut, dan bagaimana menghitung dan mengatur resiko proyeknya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah menganalisa dan menggambarkan bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Waringinsari Barat dapat mensejahterakan masyarakat secara finansial atau tidak.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Perekonomian sudah menjadi masalah rumit yang ada di masyarakat, bukan tanpa usaha atau strategi yang diciptakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini. Karena kurangnya pengetahuan dan sadarnya masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, membuat pemerintah kesusahan dalam menciptakan kesejahteraan yang menjadi cita-cita pemerintahan.

Pemerintahan menerapkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tujuannya untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Alokasi Dana Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, apabila pengelolaan perencanaan program Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar, maka potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik hingga akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan cita-cita pemerintah pun tercapai.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Aspek perekonomian di Indonesia tepatnya lembaga sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial dalam pemanfaatannya kepada publik agar meminimalisir dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Dengan demikian ilmu akuntansi menjadi suatu pedoman yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Dalam penerapan akuntansi sektor publik harus didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya ada dalam cakupan wilayah pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah saja namun lebih menjangkau hingga wilayah pedesaan.²

Akuntabilitas merupakan syarat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Pemerintahan yang berakuntabilitas publik artinya pemerintah tersebut mempertanggungjawabkan atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan secara terang-terangan diamati langsung oleh masyarakat, ini bertujuan agar masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program

² Maria Rosa Ratna Sari Angraini *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Jogjakarta*(Modus), 2016, Volume 28, H 155

pemerintah.. Selain transparansi, tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dalam program yang akan dijalankan. Memastikan tujuan dari pemerintahan tersebut terwujud serta ikut dalam menjalankan tujuan agar terciptanya masyarakat yang dinamis dan sejahtera.

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak bisa dilihat dari segi pembangunan fisik semata, namun mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik atau pembangunan ekonomi masyarakat³.

Tidak hanya pemerintahan saja yang harus mempunyai cita-cita untuk sejahtera dalam bidang ekonomi, tetapi masyarakat juga harus mempunyai keinginan yang lebih dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Masyarakat harus mempunyai kreatifitas dan ide/gagasan dalam mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga tujuan dalam menciptakan keadilan sosial, politik dan ekonomi bisa tercapai dengan mudah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan

³Loncolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5, (Yogyakarta: Uppstim Ykpn, 2015), Hlm. 31

dalam undang-undang.⁴ Maka dari itu, isi dan jenis otonomi untuk setiap daerah berbeda-beda. Namun prinsipnya tetaplah sama, yaitu beorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga keinginan masyarakat bisa tercapai seiring dengan tujuan dari pemerintah.

Seperti agenda pembangunan yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”.⁵ Melihat dari agenda pembangunan yang digagas tersebut, artinya pemerintah ingin mensejahterakan dibidang ekonomi mulai dari lingkup terkecil yang ada dipemerintahan, yaitu desa. Jika desa sudah mencapai tahapan sejahtera, maka pemerintah akan lebih mudah untuk mengembangkan pembangunan lainnya menuju tahapan yang lebih baik lagi.

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang

⁴ Dwi Febri Arifiyanto Dan Taufik Kurrohman “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember”*Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (3), 2014, 473-485

⁵ Lina Nasehatun Nafidah1 , Nur Anisa. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang” (*Jurnal Ilmu Akuntansi*), 2017, Volume 10, H 274

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonominya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonomi tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan

anggaran.⁶ Maka pemerintahan desa harus bisa memperhatikan masyarakat desanya dan selalu terbuka serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang tercantum didalam Al-qur'an surah An Nisa 4:58, berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yg berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yg sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Surah diatas menjelaskan bahwasanya pemerintah harus bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Harus menjadi amanah untuk para pemimpin yang diberikan kepercayaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Maka penting sekali untuk para pemimpin mengutamakan sikap tanggung jawab dan amanah agar pemerintahan atau desa yang dipimpin menjadi sejahtera.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau

⁶ Lina Nasehatun Nafidah1 , Nur Anisa. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang" (Jurnal Ilmu Akuntansi), 2017, Volume 10, H 276

kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
2. Menuntaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian Desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁷

Melihat tujuan dana desa yang begitu pentingnya bagi keberlangsung kehidupan masyarakat, sangat memprihatinkan bahwa ternyata tujuan dari diturunkannya dana desa belum sampai kepada tahapan dan aturan yang benar. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia corruption watch (IWC) sejak tahun 2015 hingga semester 1 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka yang merugikan negara sebesar Rp

⁷Abu Rahum, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*”, (Ejournal Ilmu Pemerintahan : 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015), H. 2.

40,6 Milyar.⁸ Dari segi pelaku kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Tercatat pada tahun 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka, di tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlah meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada tahun 2017, total pada saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa.

Selain dari kurang maksimalnya pengalokasian dana desa tersebut yang harusnya sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat yang kurang terhadap kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana desa dapat terrealisasikan dengan baik khususnya dibidang keuangan (finansial).

Dengan diterapkannya akuntabilitas dana desa, pemerintah bisa mengetahui sudah sejauh mana program dana desa berjalan atau tidak dan masyarakat pun mengetahui tentang program apa saja yang sudah dikerjakan demi mewujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh Karena itu pemerintahan dan masyarakat desa harus berkerja sama untuk menjalankan program dana desa dan sekaligus menjadi saksi apakah program dana desa sudah bisa mensejahterakan masyarakat.

⁸ Kompas.Com

Desa Waringinsari Barat merupakan desa yang memperoleh alokasi dana desa, akan tetapi kesejahteraan masyarakat dibidang finansial belum secara merata terpenuhi.⁹ Mayoritas penduduk Waringinsari Barat berprofesi sebagai petani, pedagang dan buruh harian, Karena masyarakat dominan memiliki lahan yang luas dan tanah yang subur untuk bercocok tanam, maka sebagian besar masyarakat memilih bekerja sebagai petani.

Adapun besaran pendapatan masyarakat Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu menurut profesi sebagai berikut.

Tabel 1
Pendapatan Rata-Rata Perbulan Penduduk Tahun 2015

NO	Jenis Profesi	Pendapatan Perbulan
1	Petani	Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000
2	Pedagang	Rp.700.000 – Rp.1.600.000
3	Buruh	Rp.500.000 – Rp.1.000.000

Sumber: Wawancara Kepala Desa Waringinsari Barat 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukan pendapatan masyarakat desa Waringinsari Barat pada tahun 2015 sebelum adanya dana desa.

Tabel 2
Pendapatan Rata-Rata Perbulan Penduduk Tahun 2018

NO	Jenis Profesi	Pendapatan Perbulan
1	Petani	Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000
2	Pedagang	Rp.700.000 – Rp.1.600.000
3	Buruh	Rp.600.000 – Rp.1.000.000

Sumber: Wawancara Kepala Desa Waringinsari Barat 2018

⁹ Wawancara Dengan Masyarakat Waringinsari Barat

Berdasarkan tabel di atas menunjukan pendapatan masyarakat Waringinsari Barat pada tahun 2018 dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, pendapatan masyarakat tetap tidak mengalami perubahan secara signifikan sekalipun Alokasi Dana Desa sudah diterapkan dari tahun 2015 (tiga tahun berjalan).

Selain itu, beberapa paparan warga Waringinsari Barat yang menyebutkan bahwa adanya Dana Desa sama sekali tidak menambah pendapatan mereka dalam hal perekonomian.¹⁰ Maka harus adanya kerja sama antara aparaturnya pekon/desa dengan masyarakat, serta harus *transparannya* pengelolaan dana desa agar masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan dari adanya dana desa tersebut sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Setelah dipaparkan permasalahan di atas, dengan adanya akuntabilitas yang menunjukkan bahwa dana desa di Desa Waringinsari Barat kesejahteraan finansial belum berjalan dengan maksimal. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh skripsi dengan judul “**Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat** (Studi di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu)”.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Roso Selaku Masyarakat di Desa Waringinsari Barat

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu ?
3. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat Menurut Perfektif Ekonomi Islam ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu
- b. Untuk menganalisa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Finansial Masyarakat di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu.
- c. Untuk menganalisa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat Menurut Perfektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil manfaat ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya, lebih rincinya sebagai berikut :

a. Manfaat akademis

memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan model yang lebih kompleks dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya

b. Manfaat praktisi

1) Bagi Pemerintah Desa Waringinsari Barat

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan dalam menciptakan peranan pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di Desa Waringinsari Barat.

2) Bagi Masyarakat Desa Waringinsari Barat

Penelitian ini dapat jadi acuan untuk masyarakat di Desa Waringinsari Barat agar masyarakat menjadi paham tentang apa yang menjadi tujuan dari adanya dana desa di Desa Waringinsari Barat.

F. Metode Penelitian

1. Metode, Jenis dan Sifat Penelitian

a. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹¹

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, ataupun dilembaga-lembaga pemerintah.¹²

c. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi.¹³ Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana program Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu tersebut.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), H.9.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Edisi Revisi, (Bandung: Alfabeta, 2014), H.29.

¹³ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* Edisi 4, (Yogyakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2013), H.12.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴ Populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu, dengan jumlah 1547 KK.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Penarikan sampel ditentukan dari pertimbangan peneliti berkaitan dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi sesuai dengan tujuan atau masalah diteliti.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling yaitu insidental sampling. Insidental sampling adalah teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai narasumber atau responden. Dalam hal ini peneliti menjadikan narasumber atau

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), H.80

¹⁵ Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisiplinier*, (Yogyakarta : Paradigma, 2012), H. 76

responden adalah masyarakat Desa Waringinsari Barat sebanyak maksimal 20 orang.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu melalui wawancara dan dokumentasi dengan pimpinan dan aparatur pekon.

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁷ Teknik observasi dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat.

¹⁶ *Ibid*, Hlm.89

¹⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), H.154.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan masyarakat di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁸ Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat.

5. Teknik Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, H.32.

¹⁹ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), H. 154.

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang di perolehakan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera di lakukanan analisis data melalui reduksi data.

- b. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kridebel.

- d. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁰

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni mengangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.

²⁰Sugiyono, *Op.Cit*, H. 244

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk kata dasar *compure* yang artinya menghitung. Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa inggris yaitu *accountability* yang artinya pertanggung jawaban.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa hasil laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga *realisasi* atau pelaksanaan.¹

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara

¹ Mardiasmo, 2014. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta

konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas juga menjadi syarat dasar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan supaya kekuasaan digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu akuntabilitas sebagai cara memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang adil, jujur dan dipercayai oleh semua orang.

Menurut Kohler, akuntabilitas didefinisikan sebagai :

- a. Kewajiban seseorang (*employee*), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan (*satisfactory report*) secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
- b. Pengukuran tanggung jawab (*responsibility*) atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
- c. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (*control*) yang baik atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (*regulation*) persetujuan (*agreement*), atau keabsahan (*custom*)

2. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat penting dalam mengemukakan pendapat, karena sifat transparan dan demokratis sehingga menjadi tolak ukur dalam menentukan sesuatu. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* antara lain tercermin sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas fiskal yaitu tanggung jawab atas dana publik
- b. Akuntabilitas legal yaitu tanggung jawab untuk mematuhi hukum
- c. Akuntabilitas program yaitu tanggung jawab untuk menjalankan suatu program
- d. Akuntabilitas proses yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan prosedur,
- e. Akuntabilitas *outcome* yaitu tanggung jawab atas hasil

3. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mahmudi dimensi akuntabilitas dibedakan menjadi lima bagian,² yaitu:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan kepada hukum dan peraturan lain yang menjadi syarat didalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin penegakan supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

- b. Akuntabilitas Program

Program organisasi sebaiknya adalah program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan

² Agustiawan, Abdul halim *DIMENSI-DIMENSI AKUNTABILITAS DAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK* (Riau, 2018)

organisasi. Lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat sampai dengan pelaksanaan program.

c. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban untuk melaksanakan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Organisasi publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi kedepannya.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial yaitu pertanggungjawaban lembaga publik dalam pemakaian dana publik (*public money*) secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada kebocoran dana dan pemborosan dan juga korupsi.

4. Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah

a. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena

menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

b. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

c. Prinsip *value for money*

Diterapkannya pada prinsip ini artinya ada tiga pokok yang penting dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif.

- 1) Ekonomi. Maksudnya apa yang berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah
- 2) Efisiensi. Maksudnya bahwa setiap penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna)
- 3) Efektif. Maksudnya bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target dan kepentingan publik.³

³ Triyuwono, *Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.

B. Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sangsekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.⁴ Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografisnya yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu aerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm 2.

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.⁶

Selain dari memiliki wewenang desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni. Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan dan kerukunan masyarakat desa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas keutuhan masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

2. Pemerintahan desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa pemerintah desa atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.⁷ Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab dan professional dalam menjalankan tugasnya.

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala desa bertugas dalam menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁸ Dengan demikian disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu/membantu kepala desa dalam

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 point ke 1

menjalankan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan hal-hal lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan desa.

Berikut ini adalah wewenang dari kepala desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa.

- a. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Selain dari wewenang yang harus dijalankan oleh kepala desa dalam negatur pemerintahan desa, adapun kewajiban yang harus di laksanakan untuk menjadi kepala desa yaitu¹⁰:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang akuntabel, transparan, profesioanal, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)
- f. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- h. Mengelola keuangan dan aset desa
- i. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
- j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat didesa
- k. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 point ke 2

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 point ke 4

- l. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- o. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Sesuai dengan undang-undang bahwasanya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tercantum pada pasal 48.

Perangkat desa terdiri atas:¹¹

- a. Sekertaris desa,
- b. Pelaksanaan kewilayahan, dan
- c. Pelaksanaan teknis.

Perangkat desa adalah warga desa yang diangkat oleh kepala desa yang memenuhi syarat yang sekiranya *ideal* lalu dikonsultasikan kepada camat atas nama bupati/walikota untuk sah dijadikan aparatur desa. Kemudian yang sudah sah dijadikan aparatur desa artinya sudah siap menjalankan tugas desa dan berkerja sama dengan kepala desa, maka aparatur desa harus bertanggung jawab terhadap desa.

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 tentang Desa

C. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2015 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.¹²

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebut bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen).¹³

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Bealanja Daerah (APBD) setelah di kurangi Alokasi Dana Khusus.¹⁴

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan-keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat (1) .

¹³ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat (1) Point (D), Dan Butir (4)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman keuangan pengelolaan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh pemerintah untuk Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).¹⁵

Pengelolaan Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut :

- a. Setiap kegiatan yang pendapatannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip sehat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pengaruh kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan mengambil keputusan melalui jalan musyawarah.

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal

- e. Alokasi Dana Desa harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.¹⁶

2. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan negara sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan negara sudah mempunyai atauran atau landasan hukum yang jelas, ini bertujuan agar tidak terjadi penyelewengan dan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Alokasi Dana Desa sudah ditetapkan pemerintah dalam aturan-aturan yang mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk wilayah pemerintahan tersebut adalah kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di wilayah pemerintahannya Kabupaten atau kota-kota.

Desa adalah nama lain yang dimana ada kesatuan masyarakat hukum atau yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Desa terdapat berbagai sumber pendapatan desa. Khususnya menyangkut Alokasi Dana Desa sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf (d) bahwa alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus di pahami juga bahwa desa juga sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.¹⁸

¹⁷ Uud Negara Ri 1945 Pasal 18 Ayat (1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Dibagi Atas Daerah-Daerah Provinsi Dan Daerah Provinsi Itu Dibagi Atas Kabupaten Dan Kota, Yang Tiap-Tiap Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Itu Mempunyai Pemerintah Daerah, Yang Di Atur Dalam Undang-Undang

¹⁸ Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", (Ejournal Ilmu Pemerintahan : 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015), H. 2

Berkaitan dengan pembahasan diatas yang membahas tentang dasar-dasar hukum yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa. Berikut ini dasar-dasar hukum yang berkaitan tentang pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa, Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan Bagian Kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)
- f. Peraturan pemerintah no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
- g. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014
- h. Peraturan pemerintah no 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan pemerintah no 60 tahun 2014.

3. Maksud, Tujuan, Dan Sasaran Dana Desa

Dana Desa berperan penting membantu desa dalam memajukan, meningkatkan kualitas desa serta memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar kehidupan masyarakat desa menjadi lebih maju dan sejahtera.

Selain itu masyarakat desa memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1) Disebutkan bahwa :

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayakan masyarakat desa.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan des, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyrakat desa.
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi :
 - 1) Kepala desa
 - 2) Perangkat desa
 - 3) Anggota badan permusyawaratan desa
 - 4) Anggota lembaga kemasyarakatan desa.

- 5) Mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.¹⁹

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa :

- a. Membangun dan memelihara lingkungan desa
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di desa
- e. Berpartisipasi dalam kegiatan di desa.²⁰

Dilihat dari tujuan dalam undang-undang desa, artinya desa memiliki tanggung jawab lebih dalam mewujudkan tujuan tersebut, akan tetapi dalam melaksanakannya masyarakat dan desa membutuhkan dana dalam merealisasikannya, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Adapun tujuan, maksud, dan sasaran dari Alokasi Dana Desa di Desa Waringin Sari Barat Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 Ayat (1)

²⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 Ayat (1),(2)

a. Maksud

Alokasi Dana Desa adalah bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian di salurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Untuk setiap Kabupaten-kabupaten, kemudian disalurkan ke desa-desa di setiap kabupaten tersebut. Maka peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pringsewu tepatnya di Desa Waringin Sari Barat yang mana ditempat tersebut sudah mendapatkan Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan untuk memberdayakan masyarakat.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyelenggran pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyrakatan sesuai kewenangan.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengadilan serta pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningktkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyrakat.

- 5) Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.²¹

c. Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2) Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- 4) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat²².

Dengan berlakunya Alokasi Dana Desa di Desa Waringin Sari Barat Kabupaten Pringsewu semoga memberikan dampak baik dalam kemajuan desa baik infrastruktur desa maupun dalam hal kualitas masyarakat desanya sendiri. Tetapi desa juga masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang memahami tentang menjalankan Alokasi Dana Desa dan desa juga harus mempunyai pengawasan yang khusus agar maksud, tujuan dan sasaran dari adanya Alokasi Dana Desa dapat terwujud dengan maksimal.

4. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut:

²¹ Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) (Selat Panjang:Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, 2014)

²² Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) (Selat Panjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa,2014).

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- c. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.²³

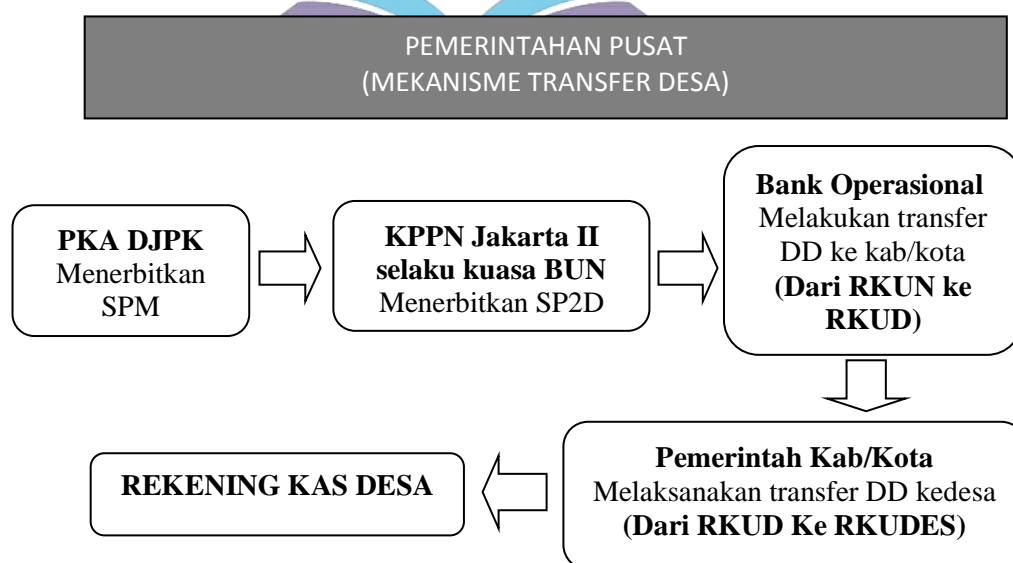
Berdasarkan prinsip tersebut artinya kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan masyarakat desa.

²³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2015, *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa*, Pasal 96 Ayat (1). h. 34

5. Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima setiap desa yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan angka kesulitan geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer dari RKUD ke RKUDes, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1
Mekanisme Transfer APBN Dana Desa

Penyaluran dana desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut.²⁴

- a. Tahap I paling cepat pada bulan dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen)
- b. Tahap II paling cepat pada bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen)
- c. Tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen)

Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah kepala kantor pelayanan pembendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:²⁵

- a. Tahap I berupa:
 - 1) Surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
 - 2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.

²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (2)

²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 100 Ayat (1)

b. Tahap II berupa:

- 1) Laporan relisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya
- 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya.

c. Tahap III berupa:

- 1) Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II.
- 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.

Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:²⁶

- a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa.
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
- c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II dari kepala desa.

Mekanisme pencairan dan penyalurn dana desa yaitu²⁷:

- a. Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dengan persentase yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan

²⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 102 Ayat (2)

²⁷ *ibid*

- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama adalah dipertanggungjawabkan baik secara administrative, secara teknis dan dasar hukum.
- d. Pencairan baik tahapan pertama maupun tahapan kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran alokasi dana desa dari kas kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ke kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana selanjutnya.
 - 2) Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala desa.
 - 3) Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemenang kas desa pada bank yang ditunjuk

D. Kesejahteraan Finansial

1. Kesejahteraan Finansial

Kesejahteraan finansial (ekonomi) adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan suatu keadaan atau kondisi hidup seseorang dilihat dari terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan finansial erat kaitannya dengan indikator kesejahteraan yang lain contohnya kesehatan dan pendidikan, tidak akan terpenuhinya kebutuhan tersebut jika kebutuhan finansial tidak mencukupi.

Kesejahteraan finansial biasanya mencakup 4 hal adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kendali atas keuangan dalam hal mampu membayar tagihan tepat waktu, tidak memiliki hutang yang tidak dapat dilunasi dan mampu memenuhi kebutuhan.
- b. Memiliki kapasitas untuk menghadapi pengeluaran dan keadaan darurat yang tak terduga. Contohnya dengan memiliki tabungan asuransi kesehatan, credit score yang baik dan dapat bergantung pada teman atau keluarga untuk bantuan finansial.
- c. Berada dalam jalur untuk mencapai tujuan finansial seperti melunasi pinjaman dalam waktu tertentu, atau menabung jumlah tertentu untuk masa pensiun.

- d. Mampu membuat pilihan yang memungkinkan orang menikmati hidup seperti berlibur, menikmati makanan enak atau bekerja lebih sedikit untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga.²⁸

Dengan terpenuhinya 4 unsur kesejahteraan finansial diatas maka kebutuhan akan mudah terpenuhi baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin yang lainnya, barulah masyarakat bisa dikatakan sejahtera.

2. Indikator Kesejahteraan Finansial

Ada beberapa langkah dalam pengelolaan ADD agar mencapai kesejahteraan finansial masyarakat :²⁹

a. Perencanaan

Ketepatan perencanaan menjadi penting karena apabila tidak adanya perencanaan yang tepat mengenai seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan maka orang atau kelompok orang tertentu akan melaksanakan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian

²⁸ Kesejahteraan Finansial Menurut Bank Universal Bpr (On-Line), Tersedia Di <https://M.Facebook.Com/Universalbpr>, (11 November 2019)

²⁹ Rosinawati, et al. 2015. Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Tahun 2015.

tujuan. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

c. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka. Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dijelaskan indikator keluarga dikatakan sejahtera ada lima pengelompokan jenis, yakni:³⁰

a. Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I

b. Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makan, pakaian, papan, penghasilan ekonomi (finansial), pendidikan, kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya. Akan tetapi belum memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi.

d. Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah bisa memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan perkembangannya, namun belum

³⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, Tentang Kesejahteraan

dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, pembangunan, serta aktualisasi diri.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan desa, yaitu:

- a. Agama
- b. Hidup atau jiwa
- c. Keluarga atau keturunan
- d. Harta atau kekayaan
- e. Intelektual atau akal

Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, kesenangan, kenyamanan dan kemewahan.

E. Pandangan Ekonomi Islam

1. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) Menurut Ekonomi Islam

Akuntabilitas/pertanggungjawaban adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau pun kegagalan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini ayat yang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam berlaku adil dalam kebijakan serta menjauhi kemungkaran. Yaitu dalam QS. An-nahl(16) ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam agama Islam sangat ditekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan yang lainnya, harus selalu beritikad baik, sopan santun dan bertanggung jawab. Terlebih lagi jika di dalam masyarakat mempunyai jabatan atau kedudukan yang tinggi, harus bisa berbuat adil dalam keputusan maupun tindakan yang diambil.

2. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam

Salah satu tujuan pokok islam adalah mempertahankan komitmen islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan demi terciptanya kesejahteraan bagi semua umat manusia. Kesejahteraan ini

meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.³¹

Berikut ini ayat yang menerangkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan terhadap sesama manusia dan menjauhi dari segala bentuk kezaliman. Yaitu pada QS, TA HA (20) ayat 117-119:

فَقُلْنَا يَتَّادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلَزَوْجُكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْقَى ۝ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا
وَلَا تَصْحَى ۝

Artinya : 117. Maka Kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, makan sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkanmu berdua dari surga, yang menyebabkanmu menjadi celaka. 118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. 119. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.
QS, TA HA ayat 117-119.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan ini merupakan unsur pertama dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka itulah hal mendasar yang harus diutamakan manusia dalam mencapai tujuan kesejahteraan tersebut.

³¹ Moh, Thahah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta, Lantabora Press, 2005, Hlm 161

Berikut ini ayat yang mengajarkan bagaimana cara berusaha dalam menggapai atau mewujudkan kesejahteraan tersebut. Yaitu pada QS, Al-Baqarah ayat 38:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu (hai Adam, setelah engkau berada di dunia, maka ikutilah). Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tiada ketakutan menimpa mereka dan tiada pula kesedihan.
QS, Al-Baqarah ayat 38.

Itulah rumus kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Quran. Rumusan ini dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial yang pada kenyataannya dapat menyempit atau meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat, serta perkembangan zaman. Untuk masa kini, kita dapat berkata bahwa yang sejahtera adalah yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, bahkan lingkungan.³² Sayyid Quthb mengatakan bahwa: Sistem kesejahteraan sosial yang diajarkan Islam bukan sekadar bantuan keuangan apa pun bentuknya. Bantuan keuangan hanya merupakan satu dari sekian bentuk bantuan yang dianjurkan Islam.

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi, yakni:³³

³² Keadilan Dan Kesejahteraan” (Online) Tersedia Di [Http://Www.Bahagia.Ut/Q7a/1129-1026/Keadilan-Dan-Kesejahteraan_7_2221131_Bahagia.Html](http://Www.Bahagia.Ut/Q7a/1129-1026/Keadilan-Dan-Kesejahteraan_7_2221131_Bahagia.Html)

³³ Afzarul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Terjemahan Soeroyo, Jakarta, Dana Bakti Wakaf, 2000, Hlm 52.

a. Keadilan

Dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, maka akan terwujud suatu keadilan.

b. Pertanggungjawaban

Sebagai seorang khalifah dimuka bumi harus senantiasa memakmurkan bumi. Setiap perilaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Serta memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja.

c. Tafakul (jaminan sosial)

Adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karna islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal tapi juga hubungan horizontal dengan menempatkannya secara seimbang.

Indikator kesejahteraan menurut islam menunjukan kepada Al-Quran surat Al-Quraaisy (106) ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ
خَوْفٍ

Artinya : 3. Maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini (ka'bah), 4. Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Dari penjelasan ayat diatas memberikan arti tentang indikator kesejahteraan menurut islam adalah sebagai berikut.³⁴

a. Menyembah tuhan (pemilik)

“Maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini (ka’bah).” Makna dari potongan ayat ini menjelaskan bahwa indikator pertama dalam Islam yang paling penting dan wajib dilaksanakan adalah pembangunan tauhid (kepercayaan).sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu masyarakat harus berus benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada pencipta.

b. Menghilangkan lapar

“Menghilangkan lapar” Makna yang terkandung bahwa tingkat ketakwaan terhadap kepercayaan harus diutamakan karna sesungguhnya yang mengatur tentang rezeki adalah dia sang khalik.

³⁴ Qurais Sihab, Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat, Edisi 2 hlm, 126-127

c. Menghilangkan rasa takut

“Mengamankan mereka dari ketakutan.” Potongan ayat ini terkandung bahwa mendapatkan rasa aman, nyaman adalah salah satu dari indikator kesejahteraan. Tidak dikatakan sejahtera jika masyarakat masih merasa terancam tentang adanya tindakan kriminal seperti perampokan, pembunuhan dan kriminal lainnya. Maka perlu adanya pembentukan kepribadian yang baik serta taat kepada perintah Allah, jika semua sudah terpenuhi barulah masyarakat dikatakan sejahtera.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai yang ada pada penelitian sebelumnya.

1. Susilo, Aden Andri (2006) dengan judul skripsi “FORMULA ALOKASI DANA DESA (ADD) DIKAUPATEN KEBUMEN, 2005”. Tujuan dalam penelitian ini untuk merumuskan formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kebumen yang mencerminkan pemerataan dan keadilan sesuai dengan kebutuhan fiskal yang dimilikinya agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antardesa. Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan model pendekatan yang didasarkan atas indikator “kebutuhan”. Berdasarkan hasil penelitiannya, ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori rendah dan terdapat selisih kurang sebesar 2,4 % dari jumlah dana yang seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD.

2. Rani Eka Diansari. ANALISIS KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PENERAPAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesiapan desa dalam penerapan UU Desa. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada objek yang akan diteliti dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, desa belum sepenuhnya mengikuti aturan UU desa.
3. Dwi Febri Arifiyanto Taufik Kurrohman dengan judul skripsi “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER”. Tujuan penelitian ini memeriksa pertanggungjawaban tentang pengelolaan ADD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirangkum bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah berdasarkan pada prinsip tanggung gugat maupun prinsip tanggung jawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se-Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi guna

pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

4. Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, Herman Karamoy. Dengan Judul Penelitian “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU”. Tujuan Penelitian Ini Untuk Melihat Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sudah Diterapkan Dengan Baik Atau Belum. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Telah Dilaksanakan Berdasarkan Prinsip Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif. Dalam Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Sudah Dilaksanakan Sesuai Dengan Mekanisme Berdasarkan Ketentuan Walaupun Masih Terdapat Kelalaian Dari Aparat Desa Dan Pengelola Teknis Kegiatan. Kompetensi Sumber Daya Pengelola Masih Merupakan Kendala Utama, Sehingga Masih Perlu Pendampingan Pemerintah Daerah. Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Dibutuhkan Pembinaan, Pelatihan, Pengawasan Dan Evaluasi Secara Berkelanjutan Kepada Aparat Desa.
5. Riskasari. Dengan Judul Penelitian “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BONGKI LENGKESE KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI.”

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Metode Yang Digunakan Peneliti Adalah Metode Kualitatif. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwapenerapan Prinsip Akuntabilitaspengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkesse Brdasarkan Indikator Akuntabilitas Kebijakan Publik (Policy Decision Accountability) Oleh Nico Sudah Memadai Dengan Pemahaman Para Perangkat Desa Mengenai Tugas Dan Fungsinya. Kemudian Dari Hasil Penelitian Juga Diperoleh Informasi Bahwa Sosialisasi Dan Diklat Tentang Pengelolaan Serta Sistem Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Telah Dilakukan Dengan Bintek Dari Kpk Namun Masih Terbatas. Dengan Demikian Strategi Pengembangan Sdm Akan Tetap Dilakukan Guna Mengoptimalkan Kesiapan Dan Kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa Dalam Menggunakan Aplikasi Sistem Yang Telah Ada.

Dilihat dari penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yang menjadi salah satu rujukan peneliti, dengan letak perbedaan yang peneliti hendak lakukan ada di segi objek penelitiannya, yaitu peneliti menggunakan sampel desa yang berbeda dan tahun yang berbeda. Peneliti melakukan penelitian di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu pada tahun 2018 dengan melihat perubahan desa setelah diterapkannya dana desa di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afzarul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Terjemahan Soeroyo, Jakarta, Dana Bakti Wakaf, 2000.
- Arsyad, Loncolin. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: Uppstim Ykpn, 2015.
- Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: CAPS, 2013.
- Data Statistik Desa Waringinsari Barat Tahun 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jumanatun Ali-ART, 2004).
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017),
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kaelan, M.S. *Metode penelitian kualitatif interdisipliner*, Yogyakarta : Paradigma, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* Edisi 4, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta, 2014.
- Moh Nazir, *Metode penelitian*, Bogor: Ghalia indonesia, 2014.
- Moh, Thahah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta, Lantabora Press, 2005.
- Monografi Pekon Waringinsari Barat, 28 Oktober 2019.
- Narbuko, Cholid and Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) (Selat Panjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, 2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1.

Quraish Sihab, Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat, Edisi 2 hlm, 126-127

Sunyoto, Danang. *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: CAPS, 2013.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2009, *Good Governance* (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), UI Press, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, Tentang Kesejahteraan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

UUD Negara RI 1945 Pasal 18 Ayat (1) Bahwa Negara Kesatuan Republik

Indonesia Dibagi Atas Daerah-Daerah Provinsi Dan Daerah Provinsi Itu Dibagi Atas Kabupaten Dan Kota, Yang Tiap-Tiap Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Itu Mempunyai Pemerintah Daerah, Yang Di Atur Dalam Undang-Undang.

Wawancara Dengan Woto Siswoyo, Kepala Kampung Waringinsari Barat 28 Oktober 2019.

Jurnal/Skripsi/Tesis

Abu Rahum, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, *Ejournal Ilmu Pemerintahan* : 3 (4) 1623-1636 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015.

Agustiawan, Abdul halim *DIMENSI-DIMENSI AKUNTABILITAS DAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK* (Riau, 2018)

Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*”*Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (3), 2014

Justita Dura, *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*.*Jurnal JIBEKA* Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016

Jurnal Perikanan Dan Kelautan, Analisis Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Bawah Kecamatan Dayun Kabupooten Siak Provinsi Riau, H 23, Diakses 11 November 2019.

Lina Nasehatun Nafidah¹ , Nur Anisa. “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang*” Volume 10, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2017.

Maria Rosa Ratna Sari Angraini *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Jogjakarta*(Modus), Volume 28, 2016.

Rosinawati, et al. 2015. Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Tahun 2015

Triyuwono, *Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 320

Online

Ahmad Abdul Haq, *Akuntabilitas*, Tersedia Di : <https://Www.Wikiapbn.Org/Akuntabilitas/> Diakses Pada 1 Maret 2015.

Elprints “*Tinjauan Tentang Masyarakat*” tersedia di : <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%202%20-%2008401244022.pdf>, (15 Januari 2019).

Keadilan Dan Kesejahteraan” (Online) Tersedia Di [Http://Www.Bahagia.Us/Q7a/1129-1026/Keadilan-Dan-Kesejahteraan_7_2221131_Bahagia.Html](http://Www.Bahagia.Us/Q7a/1129-1026/Keadilan-Dan-Kesejahteraan_7_2221131_Bahagia.Html)

Kesejahteraan Finansial Menurut Bank Universal Bpr (On-Line), Tersedia Di <https://M.Facebook.Com/Universalbpr>, (11 November 2019).

Sinta, *Kesejahteraan*, tersediadi https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/d4df0609934dad1651c737a408fa87be.pdf (15 Januari 2019)

Wikipedia, “Kesejahteraan” (On-Line), Tersedia Di <https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Kesejahteraan>, (11 November 2019)

